

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMENUHAN HAK TERDAKWA DALAM MEMPEROLEH PENDAMPINGAN KUASA HUKUM(Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

 Oleh: ESA KURNIASARI (03400060)

Law

Dibuat: 2008-04-03 , dengan 2 file(s).

Keywords: Hak Terdakwa, Pendampingan Kuasa Hukum

Hak terdakwa yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP dalam hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk didampingi oleh kuasa hukum secara cuma-cuma yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP ayat (1) dan (2) yaitu: 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji tentang 'Tinjauan yuridis sosiologis terhadap hak-hak terdakwa di dalam memperoleh pendampingan kuasa hukum (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri), yang dirumuskan:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih di dalam memperoleh pendampingan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri? 2. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam pemenuhan hak-hak terdakwa dalam pendampingan kuasa hukum di persidangan serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Sampel dari penelitian ini adalah para Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Sedangkan analisa data menggunakan teknik field research.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui mengenai hak-hak terdakwa yang sering diabaikan dan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menunjuk penasehat hukum yang dapat mendampingi terdakwa dalam persidangan terutama mengenai hak di dalam pendampingan kuasa hukum dimana dalam hal ini dibutuhkan peran semua pejabat peradilan dalam pemenuhan hak-hak terdakwa di dalam pendampingan kuasa hukum.

The right of the defendant stated in the rule of rule number 50 (the bill of law on Crime matters)/ KUHAP up to rulec number 68 in which one of them mentioned his or her right to get such accompanion in facing the problem they have and unfortunately it is only mentioned in rule number 56 of (the bill of law on Crime matters)/ KUHAP verse (1) and (2) namely: 1. This is applicable if the defendant do the crime in which it put him into capital punishment of 15 years punishment or more and those who are sentenced into five years punishment and they do not have lawyer they pay faor the help them, the related official should find or appoint the lawyer to

help the defendant facing all the investigation process. 2. Each lawyers appointed by government to help those defendants will give free of charge help as what mentioned in verse 1.

Based on that background, the writer wants to analyze the The Yuridical-sociological point of view on the defendant right in getting the lawyer accompanion (a study case in the state Court in Kediri regency) which are mentioned as follows:

1.How is the right fulfilment of defendant sentenced to five years or more in getting lawyer accompanion in State court of Kediri regency?

2.What problems faced by the judge in fulfilling the right of getting lawyer accompanion for those defendants and what efforts done to solve those problem?

This study used yuridical-sociological approach. The location of the study is in the state court of Kediri Regency. The data collection methods of this study are observation, interview, and library research. The sampes of this study are all the judges in the state court of Kediri regency. The data are analyzed by using field research.